

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta Selatan. PT. Budi Chaniago.
- Pipin Syaripin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- , dan Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Bani Quraisy. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- R. Bintarto. 2010. *Desa Kota*. Bandung.
- N. Daldjoeni. 2011. *Interaksi Desa – Kota*. Jakarta : Rineka Cipta.
- H.A.W. Widjaja. 2009. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*.
- M. Laica Marzuki. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Buku Kesatu. Edisi Revisi Cetakan Kedua. Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Didik Sukrion. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang. Malang.
- Aminuddin Ilmar. *perbuatan hukum pemerintahan*. Phinatama Media. Makassar.
- , 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nurcholis. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang. Sastra Press.
- Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Kencana.
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo

Tinggi.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Dudu Duswara Machmuddin. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung. Refika Aditama.

Asnawi Rewansyah. 2011. *Akutansi Desa Teori dan Praktek*. Malang. SC IRDH.

Lukman Hakim. 2011. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang. Setara Press.

-----, 2012. *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah*. Malang. Setara Press..

Nandang Alamsah, dkk. Tahun. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*. Bandung: UNPAD Press.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung. Nuansa.

Mhd Taufiqurrahman. *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*. Medan. Universitas Darma Agung.

Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Enam Media. Medan.

Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta. Laksbang.

Nandang Alamsah, dkk. 2017. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*. Bandung. UNPAD Press.

Radarhuk. 2017. *Wewenang Dalam Hukum administrasi negara*.

Irwansyah, dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. edisi Revisi. Mirra Buana Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BP2B. Kemendikbud. Wiktionary. 2011. Kamus Indonesia. Wiki Media Project.

Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Malang. Setara Press.

- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.39.
- Hassan Suryono, 2008, *Ilmu Negara Suatu Pengantar ke Dalam Politik Hukum Kenegaraan*, UNS Press, Surakarta.
- Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.

Skripsi/Thesis

- Mahanani, T.2016. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Pemerintah Kabupaten Jepara*. Thesis Fakultas Hukum Unissula. Program Magister. Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.
- Andi Izman Maulana P. 2015. “Efektivitas Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang Pekerjaan Umum”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Iis Mardeli, 2014, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Tesis : Magister Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta.

Jurnal/artikel

- Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”, Web Hukum. November 2022.
- Bagir Manan.2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah* , Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di KawasanPesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fak. Hukum Unpad Bandung.
- Sinulingga, E. C (et.al). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan (Studi Putusan Nomor: 79/Pid. Sus. Tpk/2017/Pn. Mdn). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Volume 1 No. 1, Mei 2021.
- Iskandar. “Keabsahan Tindakan Pemerintahan”. Artikel Analisis Yuridis. September 2013.
- Bahder Johan Nasution. “Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur

Tindak Pemerintahan yang Baik". Demokrasi, Vol. V No. 2 2006.

BJ. Nasution. *Kordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pembangunan di Daerah*. DEMOKRASI Vol. V No.2 Th.2006.

Ida Zuraida, Quo Vadis: *Penegakan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana*. Artikel Suspendik.

Ferianto, "*Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Di Puskesmas Terpencil*", Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2021.

Nurul Qamar. 2014. *Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan*. Jurnal Ilmu Hukum. Makassar.

Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi" Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.18 Nomor 2 Juni 2018.

Tedi Sudarajat, "Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil", Jurnal Civil Service, Vol. 11 Nomor 2, November 2017, Hlm. 91.

Iskatrinah, 2004, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang DepHan.

Berita/internet

Kabar Perwakilan ombudsman gorontalo

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--temuan-ombudsman-pemberhentian-aparat-desa-kabupaten-gorontalo-maladministrasi--->, diakses pada 14 September 2022 pukul 14.30 Wita.

<https://kbbi.web.id.pejabat>, diakses pada 27 Nov. 22

<https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html>. Diakses pada tanggal 05 Nov. 22

Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya Dalam Dunia Politik - Gramedia Literasi diakses pada tanggal 21 November 2022

Berita Ombudsman RI, Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkat

dan Pemberhentian Perangkat Desa,
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>, diakses pada 14 September 2022 Pukul 14.40 Wita.

[Memahami Arti Abuse of Power atau Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan | kumparan.com](#) diakses pada 27 Nov. 22

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>
diakses pada tanggal 05 November 2022.

[HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA/PERANGKAT DESA – Website Resmi Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen \(kebumenkab.go.id\)](#) di akses pada 27 Nov. 22

Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum, dari situs Hukum Online, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP DESA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.